



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SUB UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS PURWITO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN KAJIAN STRATEGIS**
3. NHK : **640408**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.770.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m²/300 m² di KOTA BOGOR ,
HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/45 m² di KOTA BOGOR ,
HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m²/84 m² di KOTA BOGOR ,
HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. Tanah Seluas 900 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 64.500.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2006,
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 560.833.882**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.445.333.882

III. HUTANG Rp. 50.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.395.333.882

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.